

Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda

Pandea Bagus Adnyanaesa¹, I Wayan Sutama²
 e-mail: Pandea.adnyana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peranan badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik berdasarkan permasalahan yang ada yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan politik, kurangnya partisipasi yang baik dari masyarakat terkait kegiatan politik. Keikutsertaan atau partisipasi politik merupakan bagian terpenting dalam hidup bernegara dan wujud dari demokrasi, akan tetapi partisipasi dari generasi muda masih kurang. Melalui Peraturan Walikota No.85 Tahun 2013 tentang tugas pokok serta fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik mengatur tentang pemberian pendidikan politik yang berguna untuk memberi pemahaman politik agar terjadi partisipasi yang aktif dan masif dari generasi muda. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peranan Kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam hal politik serta mengetahui faktor apa saja yang menghambat Kesbangpol dalam melakukan peningkatan partisipasi pemuda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari apa yang diperoleh di lapangan. Peneliti menemukan fakta bahwa terdapat beberapa hambatan dalam upaya peningkatan partisipasi generasi muda yakni adanya perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan peran kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Generasi Muda, Kesbangpol

Abstract

This research focuses on the role of the National Unity and Politics agency in organizing political education based on existing problems, namely low public awareness of politics, lack of good participation from the community regarding political activities. Participation or political participation is the most important part in the life of the state and a form of democracy, but the participation of the younger generation is still lacking. Through Mayor Regulation No. 85 of 2013 concerning the main tasks and functions of the National Unity and Politics Agency, it regulates the provision of political education which is useful for providing political understanding so that there is active and massive participation from the younger generation. The purpose of this study was to determine the role of the Kesbangpol in increasing the participation of the younger generation in political matters and to find out what factors hindered the Kesbangpol in increasing youth participation. The research method used is descriptive qualitative research method. Data obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions from what is obtained in the field. Researchers found the fact that there were several obstacles in efforts to increase the participation of the younger generation, namely changes in organizational structure, lack of clarity on the form of institutions, limited funds and the mindset of the younger generation. The results of the study show that the role of Kesbangpol in increasing youth political participation as a whole has been going well.

Keywords: Political Education, Young Generation, Kesbangpol.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan politik ialah suatu proses pemahaman dan pembelajaran tentang kewajiban, hak serta tanggung jawab oleh seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, terselenggaranya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan kewajiban dan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keikutsertaan dalam politik merupakan bentuk dari bagian terpenting didalam aspek kehidupan dalam bernegara secara demokratis. Hal tersebut dilakukan atas dasar pemerintahan yang memiliki kekuasaan memberikan kesempatan yang luas dan bebas kepada setiap warganegaranya untuk ikut serta didalam adanya aktivitas politik. Namun warganegara juga wajib untuk memperhatikan tingkatan dalam partisipasi atau keikutsertaan dalam politik yang tinggi. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kadar demokratisasi negara tersebut dipertanyakan atau tidak bisa dikatakan sebagai layak. Hal ini menyebabkan sering terjadi ketidakpuasan dan ketidakpahaman masyarakat yang aspirasinya tidak tersampaikan ketika hak mereka telah diberikan kepada partai politik. Permasalahan ini menimbulkan tingginya angka golput yang melambangkan ketidakpuasan terhadap penyajian penampilan kepribadian. Dalam pelaksanaan, penerapan, keikutsertaan politik masih sering diperdebatkan tentang cara pemakaian politik yang melibatkan uang. Hal tersebut agar memberi pengaruh terhadap cara – cara penentuan tentang calon dari partai politik yang dianggap sesuai, memenuhi syarat dan ketentuan. Permasalahan tentang keikutsertaan dalam politik tidaklah hanya bersangkutan dengan karakter, sifat, dan watak dari suatu pemerintahan yang dimiliki oleh negara, akan tetapi lebih pada keterkaitan terhadap karakter dari masyarakat yang ada didalam negara tersebut dan efek yang diberikan.

Generasi muda sebagai *agent of change* merupakan generasi perubahan bangsa yang akan mengisi pembangunan di Indonesia. Namun kenyataannya, generasi muda saat ini memang sangat kurang dalam berpartisipasi politik, mereka cenderung mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Saat ini generasi muda hanya peduli dengan isu-isu politik yang sedang memanas saja. Namun keikutsertaan para generasi muda ini hanya terjalin di permukaan, apabila tidak diajari dengan pembelajaran, akan memunculkan partisipasi pasif dari generasi muda. Oleh sebab itu, diharapkan kesertaan generasi muda tidak hanya pada isu-isu politik yang berlangsung, namun juga diaplikasikan pada proses politik, melalui kesertaan aktif dalam pemilihan umum atau Pilkada. Generasi muda dari keseluruhan jumlah yang berhak memberikan suaranya, maka dari itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penentuan hasil akhir dari suatu kebijakan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi melibatkan seluruh rakyatnya untuk berperan aktif dalam menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui partisipasi politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam ranah politik. Partisipasi Politik Warga Negara dalam kehidupan berbangsa, sangat berpotensi pada perolehan suara di pilkada. Pilkada adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Sifat pemilih pemula memiliki banyak karakteristik, pada umumnya masih bersifat labil dan tidak peduli atau apatis, kurangnya ilmu pengetahuan politik yang diperoleh, dan lebih condong kepada mengikuti trend atau teman sepergaulan. Minimnya pemahaman mereka terhadap pentingnya arti dari demokrasi yang sedang dirayakan menyebabkan berkurangnya gairah dan antusias terhadap politik yang ada dikota Pekanbaru. Ditandai dengan rendahnya pemahaman, tidak mengetahui cara memilih, partisipasi yang rendah. Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan

total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen. Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, jika diartikan secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama.

Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Para Caleg dalam kampanyenya akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis, yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat dan memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah. Secara lebih tegas lagi mengenai Pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menumbuhkan pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab munculnya golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

2. METODE

Kegiatan Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Oleh Kesbangpol Di Kabupaten Tabanan dilakukan secara teknis dan melibatkan Kerjasama teman-teman dan juga staf Sekretariat Kesbangpol Tabanan. Selain adanya kolaborasi kegiatan ini juga di dukung oleh sumber daya manusia yang bermutu dan profesional. Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) kemudian meminta data pada instansi pada saat pelaksanaan PKL, kegiatan ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatifata diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari apa yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam suatu kegiatan. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara. Hal ini tercantum di pasal 28 dalam UUD 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Selain itu, diatur pula di dalam UU No 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang

harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Menurut Budiardjo (2009: 367), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dengan demikian, partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait hal tersebut, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di tanah air dewasa ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat. Kondisi itu setidaknya dapat dilihat dari beberapa hasil pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) sebelumnya, yaitu Pemilu 1999 dengan tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92,74 persen, pemilu 2004 dengan 84,07 persen dan pemilu 2009 dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71 persen.

Fenomena menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu itu setidaknya juga tergambar dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2013. Setidaknya, angka partisipasi politik masyarakat dalam pilkada berkisar antara 50-70 persen. Sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan pemilu sangatlah diharapkan, terutama dalam rangka memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*. *Political socialization* jika diartikan secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Para Caleg dalam kampanyenya akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, ke dua untuk memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah. Atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek pemilu yang lebih berkualitas. Munculnya Golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran kesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik pemuda secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni pelaksanaan tugas sesuai aturan dan koridor, serta menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendidikan politik pada generasi muda secara masif. Meskipun juga terdapat beberapa hambatan seperti adanya perubahan struktur organisasi, kurang jelasnya bentuk lembaga, keterbatasan dana dan pola pikir generasi muda, hal tersebut dapat diatasi melalui peranan kesbangpol sebagai fasilitator pendidikan

politik yang dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan partisipasi politik ada sebagian masyarakat yang memahami tujuan dari pemilu tersebut dan ada juga yang tidak memahami tujuan dari pemilu tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini dapat berjalan dengan partisipasi dan dukungan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dinas Perijinan Kota Tabanan
2. Kepala Badan Kesbangpol Tabanan
3. Staff Kesbangpol Tabanan
4. Peserta Praktek Kerja Lapangan Kesbangpol Tabanan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <http://eprints.ipdn.ac.id/9947/1/project%20sane.pdf> diakses pada tanggal 26 agustus 2022
- [2] Rahmad Hidayat (2021). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 (Provinsi Mataram). Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram.
- [3] <http://repository.utu.ac.id/943/1/BAB%20I-V.pdf> diakses pada tanggal 26 agustus 2022
- [4] <http://kesbangpol.acehtengahkab.go.id/halaman/sejarah> diakses pada tanggal 28 agustus 2022
- [5] <https://kesbangpol.baliprov.go.id/kaban-kesbangpol-bali-ke-tmp-pancaka-tirta-tabanan/> diakses pada tanggal 29 agustus 2022
- [6] <http://eprints.ipdn.ac.id/9947/> diakses pada tanggal 29 agustus 2022
- [7] <https://tirto.id/ccontoh-partisipasi-politik-warga-negara-dalam-kehidupan-berbangsa-gbJN> di akses pada tanggal 30 agustus 2022
- [8] <https://wartabalionline.com/2022/08/24/baru-16-parpol-lapor-ke-kesbangpol-linmas-tabanan/> di akses pada tanggal 30 agustus 2022
- [9] http://eprints.ipdn.ac.id/6207/1/RINGKAI_ILHAM%20AGUNG.pdf diakses pada tanggal 30 agustus 2022